

## RINGKASAN

Sejak jatuhnya rezim Soeharto pada 1998, Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) memainkan peran yang besar dalam agenda pemerintahan di Indonesia. Kebijakan RB yang telah digulirkan sejak lama ini, masih terus berlanjut diikuti dengan berbagai regulasi sebagai pedoman yang menjadi mandat *top-down* untuk menciptakan kendali serta kontrol yang seragam (*one size fits all*) bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia, salah satunya pada tingkat pemerintah daerah melalui penyusunan road map RB yang berlaku pada tahun 2020-2024. Keterlibatan instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian penting dalam upaya RB pada level lokal ini, memberikan respon yang positif dilihat dari peningkatan nilai RB yang signifikan dari tahun ke tahun, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Disisi lain, kebijakan RBN yang diturunkan secara wajib dan seragam ini menuai kritikan dari para ahli maupun sarjana administrasi publik yang menyoroti pentingnya penyesuaian dan adaptasi sesuai dengan konteks lingkungan daripada mengadopsi pendekatan yang bersifat universal.

Fakta mengenai pelaksanaan kebijakan RB di Kabupaten Banyumas yang berjalan dengan baik dan progresif di tengah kegelisahan proses transfer kebijakan yang dilaksanakan *one size fits all* menjadi menarik untuk diteliti. Dengan menghadirkan konsep transfer kebijakan sebagai dasar analisis, penelitian ini berupaya untuk menunjukkan bagaimana proses difusi/transfer kebijakan RBN yang *one size fits all* dalam membentuk road map RB di Kabupaten Banyumas melalui model atau kerangka kerja transfer kebijakan menurut Dolowitz & Marsh (2000). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan menganalisis berbagai dokumen publik yang ada. Data yang diperoleh ini kemudian dianalisis dengan metode analisis data interaktif dan diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi hingga mendapat kesimpulan utuh dari penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan RBN setelah maupun sebelum penajaman, selain ditransfer secara seragam dan wajib (*one size fits all*) juga telah ditransfer pada level *voluntarily-but driven by perceived necessity* hingga *coercive* dengan berbagai rasionalitas yang menyertainya. Dalam praktiknya, kebijakan ini bertemu dengan konteks yang beragam dengan berbagai hambatan dan kendala sehingga membentuk road map RB di Kabupaten Banyumas dengan kategori *incompleted transfer*. Namun demikian, semangat dan komitmen serta kesiapan para aktor serta didorong oleh kesadaran akan adopsi secara kontekstual dengan nilai-nilai lokal yang ada, membuat proses transfer kebijakan tetap berjalan dalam membentuk road map RB di Kabupaten Banyumas.

**Kata Kunci:** *Difusi/Transfer Kebijakan, Reformasi Birokrasi Nasional, Road Map Reformasi Birokrasi*

## SUMMARY

Since the fall of the Soeharto regime in 1998, National Bureaucratic Reform (RBN) has played a large role in the government agenda in Indonesia. The RB policy, which has been in place for a long time, continues to be followed by various regulations as guidelines that become mandates top-down to create uniform control and control (one size fits all) for all government agencies in Indonesia, one of which is at the regional government level through the preparation of a RB road map which will take effect in 2020-2024. The involvement of local government agencies, which is an important part of RB efforts at the local level, has provided a positive response as seen from the significant increase in RB values from year to year, one of which occurred in Banyumas Regency. On the other hand, the mandatory and uniform RBN policy has drawn criticism from public administration experts and scholars who highlight the importance of adjusting and adapting according to the environmental context rather than adopting a universal approach.

Facts regarding the implementation of the RB policy in Banyumas Regency which is running well and progressively amidst the anxiety of the policy transfer process being implemented one size fits all be interesting to research. By presenting the concept of policy transfer as a basis for analysis, this research attempts to show how the RBN policy diffusion/transfer process occurs one size fits all in forming RB road map in Banyumas Regency through a policy transfer model or framework according to Dolowitz & Marsh (2000). This research uses descriptive qualitative methods with informant selection techniques purposive sampling. The data sources used are primary data and secondary data with data collection techniques through interviews and documentation by analyzing various existing public documents. The data obtained was then analyzed using interactive data analysis methods and tested for validity using triangulation techniques to obtain complete conclusions from the research.

The research results show that the RBN policy after and before sharpening, apart from being transferred uniformly and mandatory (one size fits all) has also been transferred on level voluntarily-but driven by perceived necessity until coercive with various rationalities that accompany it. In practice, this policy meets diverse contexts with various obstacles and obstacles, thus forming a RB road map in Banyumas Regency with categories incompleting transfer. However, the enthusiasm, commitment and readiness of the actors and driven by awareness of contextual adoption with existing local values, means that the policy transfer process continues in forming the RB road map in Banyumas Regency.

**Keywords:** *Policy Diffusion/Transfer, National Bureaucratic Reform, Bureaucratic Reform Road Map*